BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya.

2.1.1 Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Untuk mengetahui jenis usaha apa yang sedang dijalankan perlu memperhatikan kriteria-kriterianya terlebih dahulu. Hal ini penting digunakan untuk pengurusan surat ijin usaha kedepannya dan juga menentukan besaran pajak yang akan dibebankan kepada pemilik UMKM.

Berikut masing-masing pengertian UMKM dan kriterianya :

1. Usaha Mikro

Pengertian usaha mikro diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro.

Usaha yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak Rp 300.000.000,-.

2. Usaha Kecil

Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah.

Usaha yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp 50.000.000,- dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai Rp 500.000.000,-. Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara Rp 300.000.000,- sampai paling banyak Rp 2,5.000.000.000,-.

3. Usaha Menengah

Pengertian usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari Rp500.000.000,- hingga Rp10.000.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunannya mencapai Rp2,5 .000.000,- milyar sampai Rp50.000.000.000,-.

2.1.2 Klasifikasi UKM (Usaha Kecil Menengah)

Berdasarkan perkembangannya, UKM di Indonesia dapat dibedakan dalam 4 kriteria, diantaranya :

1. *Livelihood Activities*, yaitu UKM yang dimanfaatkan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Misalnya adalah pedagang kaki lima.
2. *Micro Enterprise*, yaitu UKM yang punya sifat pengrajin namun belum punya sifat kewirausahaan.
3. *Small Dynamic Enterprise*, yaitu UKM yang telah memiliki jiwa entrepreneurship dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor
4. *Fast Moving Enterprise*, yaitu UKM yang punya jiwa kewirausahaan dan akan bertransformasi menjadi sebuah Usaha Besar (UB).

2.2 Pengertian Bank

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Menurut Kasmir (2008:8).

Menurut undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari Kedua pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya ialah :

1. Menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat.
2. Menyalurkan dana (*lending*) ke masyarakat, dalam hal ini bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*) seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (inkaso), *letter of credit* (L/C), *safe deposit box*, bank garansi, *bank notes*, *travelers cheque*, dan jasa lainnya.

2.2.1 Asas, Fungsi dan Tujuan Bank

Dalam pasal 2, 3 dan 4 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, dinyatakan asas, fungsi dan tujuan bank adalah sebagai berikut :

A. Asas

Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berlandaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian.

B. Fungsi

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

C. Tujuan

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilisasi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak.

2.2.2 Jenis-jenis Bank

Menurut Undang-undang Pokok Perbankan Nomor 7 tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998, maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari :

1. Bank Umum

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada, begitu pula dengan wilayah operasinya, dapat dilakukan diseluruh wilayah Indonesia bahkan ke luar negeri (cabang), Bank umum sering disebut bank komersial (*commercial bank*)

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran. Artinya, jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa keuangan lainnya.

2.2.3 Sumber Pendanaan Bank

Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Sesuai dengan fungsi bank yaitu sebagai lembaga keuangan dimana kegiatan sehari-harinya adalah bergerak dibidang keuangan, maka sumber-sumber dana juga tidak terlepas dari bidang keuangan. Untuk menompang kegiatan bank sebagai penjual uang (memberikan pinjaman), bank harus lebih dahulu membeli uang (menghimpun dana) sehingga bunga tersebut bank memperoleh keuntungan.

Sumber dana bank menurut Kasmir (2008:46) dapat diperoleh dari :

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri

Perolehan dana dari sumber bank itu sendiri (modal sendiri) maksudnya adalah dana yang diperoleh dari dalam bank. Perolehan dana ini biasanya digunakan apabila bank mengalami kesulitan untuk memperoleh dana dari luar.

Adapun pencairan dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari :

- A. Setoran modal dari pemegang saham, yaitu modal dari para pemegang saham lama atau pemegang saham baru.
- B. Cabang laba, yaitu laba yang setiap tahunnya dicadangkan oleh bank dan sementara waktu belum digunakan.
- C. Laba dari bank yang belum dibagi, yaitu laba tahun berjalan tapi belum dibagikan kepada para pemegang saham.

2. Dana yang berasal dari masyarakat luas

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kesehatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai

operasinya dari sumber dana ini. Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas bank dapat tiga macam jenis simpanan (rekening) yaitu Simpanan Giro, Tabungan dan Deposito.

3. Dana yang bersumber dari lembaga lain

Sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencairan sumber dana pertama dan kedua diatas. Pencairan dari sumber ini relatif mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu. Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari :

- A. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya.
- B. Pinjaman antar bank (*Call money*). Biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring didalam lembaga kliring dan tidak mampu untuk membayar kekalahannya.
- C. Pinjaman dari bank-bank luar negeri. Merupakan pinjaman diperoleh perbankan dari pihak luar negeri.
- D. Surat Berharga Pasar Uang (SPBU). Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SPBU kemudian diperjual belikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan.

2.3 Pengertian Kredit

Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa latin, *credere*, yang berarti kepercayaan. Misalkan, seorang nasabah debitur yang memperoleh kredit

dari Bank adalah tentu seseorang yang mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur adalah kepercayaan. Menurut Hermansyah (2005:54),

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pemberian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.

Dalam pasal 1 butir UU No. 10 Tahun 1998 dirumuskan bahwa kredit adalah :

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara Bank sama pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan pengertian diatas menunjukkan bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur atas kredit diberikan kepadanya adalah tidak semata-mata melunasi utangnya tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

2.3.1 Tujuan dan Fungsi Kredit

Fungsi kredit menurut Mia (2013:27) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya guna uang;
2. Meningkatkan peredaran dana lalu lintas uang;
3. Meningkatkan daya guna dan peredaran uang;
4. Salah satu alat stabilitas ekonomi;

5. Meningkatkan kegairahan berusaha;
6. Meningkatkan pemerataan pendapatan;
7. Meningkatkan hubungan internasional.

2.3.2 Unsur-unsur Kredit

Sebagai mana diketahui bahwa unsur esensial dari kredit bank adalah kepercayaan dari bank sebagai kreditur terhadap nasabah peminjam kepada debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratannya untuk memperoleh kredit Bank oleh debitur. Menurut Hermansyah (2005:56) antara lain :

1. Jelasnya tujuan peruntukan kredit
2. Adanya benda jaminan atau agunan

Makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya Keyakinan dari Bank sebagai kreditur bahwa kredit yang diberikan akan bersungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

Unsur-unsur kredit terdiri dari :

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan oemberian kredit (Bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dana diluncurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan.

2. Kesepakatan

Yaitu disamping unsur kepercayaan didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibanya masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak bank dan nasabah.

3. Jangka waktu

Yaitu setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

4. Resiko (*Degree of Risk*)

Yaitu faktor resiko kerugian diakibatkan dua hal, yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah disengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko yang diakibatkan terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu) suatu kredit semakin besar resiko tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun resiko yang tidak disengaja.

5. Balas Jasa

Yaitu akibat pemberian fasilitas kredit bank tertentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional.

Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi, serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.3.3 Jenis-jenis kredit

Secara umum kredit yang diberikan oleh bank bisa dilihat dari segi kebutuhannya menurut Kasmir (2012:85) adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari Segi Kegunaan

Maksud kredit dilihat dari segi kegunaannya adalah untuk melihat debitur menggunakan uangnya digunakan untuk kepentingan utama atau kepentingan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit yaitu:

a) Kredit Investasi

Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk satu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

b) Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produk dalam operasionalnya. Contoh, kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Kredit modal kerja merupakan kredit yang dicairkan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada.

2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

Kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit, apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi.

Jenis kredit dilihat dari segi tujuan adalah sebagai berikut :

a) Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi dan investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya, kredit digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu baik berupa barang dan jasa.

b) Kredit Konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seorang atau badan usaha.

c) Kredit Perdagangan

Merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

Dilihat dari segi jangka waktu, artinya lamanya masa pemberian kredit mulai dari pertama kali diberikan sampai masa perlunasannya jenis kredit ini adalah sebagai berikut :

a) Kredit Jangka Pendek

Yaitu kredit yang memiliki jangka waktu dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b) Kredit Jangka Menengah

Yaitu kredit yang memiliki jangka waktu berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja. Beberapa bank mengklasifikasikan kredit menengah menjadi kredit jangka panjang.

c) Kredit Jangka Panjang

Yaitu Kredit yang memiliki jangka waktu masa pengembaliannya paling panjang yaitu, diatas 3 tahun sampai 5 tahun. Biaya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan untuk juga kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari Segi Jaminan

Dilihat dari segi jaminan maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan adalah sebagai berikut :

a) Kredit dengan Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.

b) Kredit tanpa Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

c) Dilihat dari Segi Sektor Usaha Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemberian fasilitas kredit pun berbeda pula.

Jenis kredit jika dilihat dari sektor usaha sebagai berikut :

- (1) Kredit Pertanian
- (2) Kredit Peternakan
- (3) Kredit Industri
- (4) Kredit Pertambangan
- (5) Kredit Pendidikan
- (6) Kredit Profesi
- (7) Kredit Perumahan

2.3.4 Dasar-dasar Pemberian Kredit

Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank wajib memperhatikan hal-hal sebagai mana ditentukan dalam pasal 8 ayat

(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi :

Pasal 8 ayat (1)

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud dengan di perjanjian.

Pasal 8 ayat (2)

“Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.

Pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang wajib dimiliki dan ditetapkan oleh bank dalam pemberian kredit dan pembiayaan adalah sebagai berikut :

- a. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibuat dalam perjanjian tertulis.
- b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan modal agunan, dan proyek usaha dari nasabah debitur.
- c. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
- d. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
- e. Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitur dan atau pihak-pihak terafiliasi.
- f. Penyelesaian sengketa.

Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah, penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman kepada analisis 7P dan analisis 5C.

Menurut Kasmir (2008:91) ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan dengan analisis 7P, analisis 5C dan studi kelayakan diantaranya:

1. Prinsip pemberian kredit dengan analisis 7P dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Personality

Dalam hal ini pihak Bank mencari data dengan lengkap mengenai kepribadian si pemohon kredit, antara lain mengenal dengan riwayat hidupnya, pengalamannya dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat, dan lain-lain. Hal ini diperlukan untuk menentukan persetujuan kredit yang diajukan oleh pemohon kredit.

b) Party

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.

c) Purpose

Selain mengenai kepribadian (personality) dari pemohon kredit, bank juga harus mencari data tentang penggunaan kredit tersebut sesuai *line of business* kredit bank yang bersangkutan.

d) Prospect

Dalam hal ini harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit. Misalnya, apakah

usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit mempunyai prospek dikemudian hari ditinjau dari aspek ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

e) Payment

Bahwa dalam penyaluran kredit, bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.

f) Profitability

Untuk mengetahui bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode-periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperoleh dari bank.

g) Protection

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan dari bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, orang atau jaminan asuransi.

2. Analisis 5C dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Character

Bahwa calon nasabah debitur memiliki watak, moral, dan sifat-sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon nasabah debitur untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya. Informasi ini dapat diperoleh oleh bank melalui riwayat hidup, riwayat usaha, dan informasi dari usaha-usahanya yang sejenis.

b) Capacity

Yang di maksud dengan *capacity* dalam hal ini adalah kemampuan calon nasabah atau debitur untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan mendapat keuntungan yang menjamin bahwa ia mampu melunasi utang kreditya dalam jumlah dan waktu yang telah ditentukan. Pengukuran kemampuan ini dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, misalnya pendekatan materil, yaitu melakukan penilaian terhadap keadaan neraca laporan rugi laba, dan arus kas (*cash flow*) usaha dari beberapa tahun terakhir.

c) *Capital*

Dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit. Penyelidikan ini tidaklah semata-mata didasarkan pada besar kecilnya modal, akan tetapi lebih difokuskan kepada bagai mana distribusi modal di tempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang telah ada dapat berjalan secara efektif.

d) *Colleteral*

Colleteral adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (*back up*) atas risiko yang mungkin terjadi atas *one* prestasinya nasabah debitur dikemudian hari, misalnya terjadi kredit macet jaminan ini diharapkan mampu melunasi sisa utang kredit baik utang pokok maupun bunganya.

e) *Condition of Economy*

Bahwa dalam pemberian kredit oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank

untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

2.3.5 Prinsip Pemberian Kredit

Pada dasarnya pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur, berpedoman kepada 2 prinsip. Menurut Hermansyah (2005:61) yaitu :

1. Prinsip Kepercayaan

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur selalu didasarkan kepada kepercayaan. Bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi nasabah debitur sesuai dengan peruntukannya dan terutama sekali bank percaya nasabah debitur yang bersangkutan mampu melunasi utang kredit beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

2. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit nasabah debitur harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.

2.3.6 Penggolongan Kredit

Istilah penggolongan kredit dalam bagian ini adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan penggolongan kredit berdasarkan kolektibilitas

kredit yang menggambarkan kualitas kredit tersebut, mengenai pengaturan penggolongan kolektibilitas kredit terdapat dalam surat keputusan direksi bank Indonesia No 23/68/KEP/DIR tentang penggolongan kolektibilitas aktiva produktif dan pembentukan cadangan atas aktiva.

Ketentuan sebagai mana diatur surat keputusan Direktur Bank Indonesia NO 26/22/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang kualitas Aktiva produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan Aktiva produktif, diubah kembali dengan surat keputusan Direktur Bank Indonesia No. 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 tentang kualitas Aktiva produktif.

Penggolongan kualitas kredit menurut surat keputusan Direktur Bank Indonesia No. 30/267/KEP/DIR tersebut. Menurut Hermansyah (2005:62) adalah sebagai berikut :

1. Kredit Lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria :
 - a) Pembayaran angsuran pokok dan bunga tetap
 - b) Memiliki mutasi rekening yang aktif
 - c) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai
2. Kredit dalam Perhatian Khusus, yaitu apabila memenuhi kriteria :
 - a) Terdapat tunggakan angsuran atau bunga yang belum melalui 90 hari.
 - b) Kadang-kadang terjadi cerukan
 - c) Mutasi rekening relatif rendah
 - d) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang di perjanjikan
 - e) Didukung oleh pinjaman baru
3. Kredit Kurang Lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria :

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari.
- b) Sering terjadi cerukan.
- c) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
- d) Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
- e) Dokumentasi pinjaman yang lemah

4. Kredit Yang Diragukan, yaitu apabila memenuhi kriteria :

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 180 hari
- b) Sering terjadi cerukan yang bersifat permanen
- c) Terjadi *one* prestasi lebih dari 180 hari
- d) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan

5. Kredit macet, apabila memenuhi kriteria :

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.
- b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- c) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

2.3.7 Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2008:95) kredit terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit sampai dengan kredit yang dikucurkan. Tahapan-tahapan dalam memberikan kredit ini kita kenal

dengan nama prosedur pemberian kredit. Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan untuk diterima atau ditolaknya suatu kredit. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila dalam penilaian mungkin ada kekurangan, maka pihak bank dapat meminta kembali ke nasabah atau bahkan langsung ditolak.

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya letak persyaratan dan ukuran-ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing. Dalam praktiknya prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

Menurut Kasmir (2008:96) prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut :

1. Pengajuan Proposal

Untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank maka tahap yang pertama pemohon kredit mengajukan permohonan kredit secara tertulis dalam suatu proposal. Proposal kredit harus dilampiri dengan dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan.

2. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tahap selanjutnya adalah penyelidikan dokumen-dokumen yang diajukan pemohon kredit. Tujuannya adalah mengetahui apakah berkas yang diajukan

sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau belum cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

Dalam penyelidikan berkas hal-hal yang perlu diperhatikan adalah membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang ada, seperti kebenaran dan keaslian Akta Notaris, TDP, KTP, dan surat-surat Jaminan seperti Sertifikat Tanah, BPKB Mobil ke instansi yang berwenang mengeluarkannya. Kemudian jika asli maka pihak bank mencoba mengkalkulasi apakah jumlah kredit yang diminta memang relevan dan kemampuan nasabah untuk membayar. Semua ini dengan menggunakan perhitungan terhadap angka-angka yang dilaporkan keuangan dengan berbagai rasio keuangan yang ada.

3. Penilaian Kredit

Dalam penilaian layak atau tidaknya suatu kredit disalurkan, maka perlu dilakukan suatu penilaian kredit. Penilaian kelayakan suatu kredit dapat dilakukan dengan menggunakan 5C dan 7P, namun untuk kredit yang lebih besar jumlahnya perlu dilakukan metode penilaian dengan Studi Kelayakan. Dalam Studi Kelayakan ini setiap aspek dinilai apakah memenuhi syarat atau tidak. Apabila salah satu aspek tidak memenuhi syarat maka perlu dilakukan pertimbangan untuk mengambil keputusan.

4. Wawancara Pertama

Tahap ini merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara ini dibuat serileks mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pertanyaan yang diajukan dapat pula dilakukan dengan wawancara terstruktur, tidak terstruktur, atau wawancara stress atau dengan objek nasabah.

5. Peninjauan ke Lokasi (*On The Spot*)

Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil penyelidikan dan wawancara maka langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi objek kredit. Kemudian hasil (*on the spot*) dicocokkan dengan hasil wawancara pertama. Pada saat melakukan *on the spot* hendaknya jangan diberi tahu kepada nasabah, sehingga apa yang kita lihat dilapangan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Tujuan peninjauan ke lapangan adalah untuk memastikan bahwa objek yang akan dibiayai benar-benar dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam proposal.

6. Wawancara Kedua

Hasil peninjauan ke lapangan dicocokkan dengan dokumen yang ada serta hasil wawancara satu dalam wawancara kedua. Wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan

pada saat wawancara pertama dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

7. Keputusan Kredit

Setelah melalui berbagai penilaian mulai dari kelengkapan dokumen keabsahan dan keaslian dokumen serta penilaian yang meliputi seluruh aspek studi kelayakan kredit, maka langkah selanjutnya adalah keputusan kredit.

Keputusan kredit adalah menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit mencakup :

- a. Akad kredit yang akan ditanda tangani
- b. Jumlah uang yang diterima
- c. Jangka waktu kredit, dan
- d. Biaya-biaya yang harus dibayar.

Keputusan kredit biasanya untuk jumlah tertentu merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi kredit yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

8. Penandatanganan Akad Kredit / Perjanjian Lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dan diputuskanya kredit sebelum kredit dicairkan, maka terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, kemudian mengikat jaminan kredit dengan hipotik atau surat perjanjian yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan :

- a. Antara bank dengan debitur secara langsung, atau
- b. Melalui notaris

9. Realisasi Kredit

Setelah akad kredit ditandatangani, maka langkah selanjutnya adalah merealisasikan kredit. Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Dengan demikian, penarikan dana kredit dapat dilakukan melalui rekening yang telah dibuka. Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dan pemberian kredit dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit. Pencairan dana kredit tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak dan dapat dilakukan :

- a. Sekaligus
- b. Atau secara bertahap

2.4 Pengertian Prosedur

Prosedur menurut kamus bahasa Indonesia : “Tahapan kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas atau dengan kata lain prosedur adalah metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah”.

Menurut Ali (2000:325) : “Prosedur adalah tata cara kerja atau cara menjalankan suatu pekerjaan”.

Menurut Azhar (2000:195) : “Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama”.

Prosedur (*procedure*) didefinisikan oleh Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011:23) sebagai berikut : “Serangkaian langkah/kegiatan klerikal

yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan”.

Menurut Mulyadi (2010:5) mengemukakan bahwa: “Prosedur adalah urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang”.

Menurut M. Nafarin (2009:9) menjelaskan bahwa : “Prosedur (*Procedure*) adalah urutan seri tugas yang saling berkaitan dan dibentuk guna menjamin pelaksanaan kerja yang seragam”.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli mengenai prosedur, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa prosedur adalah suatu urutan langkah-langkah pemrosesan data atau urutan kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap suatu transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.